



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MEMPAWAH**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana program kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Mempawah, Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Mempawah



Drs. ASWIN AS, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196802031989031007



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2021.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.....	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan	26
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN	27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten.....	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.....	27
3.3. Program dan Kegiatan	30
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	32
BAB. V PENUTUP	33
LAMPIRAN.	iii

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkanya UU nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 Tahun 2004 juga diwajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang di selenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Renja OPD.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2025 ini menyusun rencana kerja (RENJA) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tahun 2025, Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tahun 2025, merupakan rencana Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup seperti yang tertuang dalam Renstra 2025 – 2026 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Program yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Visi: "Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing".

Misi 1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mempawah yang berkualitas;

Misi 2. Mewujudkan kemandirian pembangunan perekonomian yang berdaya saing;

Misi 3. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;

Misi 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan Lingkungan Hidup. Dikaitkan dengan visi dan misi dalam RPJPD 2005-2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup terkait erat dengan pencapaian Misi ke 3 dan 4 yaitu: Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat penerima manfaat atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Dengan demikian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan berpengaruh pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Mempawah menetapkan Misi 3 dan 4 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai

Tujuan :

- 1.1 Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
- 1.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks).

Sasaran :

- 1.2.1 Meningkatkan Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan dengan indikator kinerja utama Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Perlengkapan Jalan (Persentase)
- 1.2.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks).Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mempawah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024:

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antarwilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD



BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Lalu

Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah selama tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

1. Evaluasi Program Tahun 2023

Anggaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 22.546.369.616,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah), terealisasi sebesar Rp. 21.583.167.959,00 (dua puluh satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau terealisasi 95,73%, dengan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 20.442.052.516,00 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua ribu lima puluh dua ribu lima rtaus enam belas rupiah) terealisasi sebesar Rp. 19.508.264.294,00 (sembilan belas milyar lima ratus delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 95,43% dan belanja modal sebesar Rp. 2.104.317.100,00 (dua milyar seratus empat juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.074.903.665,00 (dua milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) atau 98,60% yang dijabarkan melalui 10 (sepuluh) Program, 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan termasuk rutin yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Evaluasi Hasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			6.581.639.999,00	6.461.072.041,00	98,17
Program	02.11.02	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	99.567.000,00	99,57
Kegiatan	02.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.567.000,00	99,57
Sub Kegiatan	02.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	100.000.000,00	99.567.000,00	99,57
Program	02.11.03	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	108.578.800,00	83.983.717,00	77,35



Kegiatan	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	45.893.500,00	32.771.867,00	99,35
Sub Kegiatan	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	23.098.900,00	15.680.250,00	67,88
Sub Kegiatan	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	22.794.600,00	17.091.617,00	74,98
Kegiatan	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	62.685.300,00	51.211.850,00	90,78
Sub Kegiatan	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	62.685.300,00	51.211.850,00	81,70
Program	02.11.04	PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	303.049.700,00	301.108.135,00	99,36
Kegiatan	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	303.049.700,00	301.108.135,00	99,36
Sub Kegiatan	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	303.049.700,00	301.108.135,00	99,36
Program	02.11.05	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	36.814.700,00	25.849.150,00	70,21
Kegiatan	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	23.375.000,00	15.910.100,00	68,06
Sub Kegiatan	2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	23.375.000,00	15.910.100,00	68,06
Sub Kegiatan	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	0	0	0 -
Kegiatan	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.439.700,00	9.939.050,00	73,95
Sub Kegiatan	2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0	0	0



Sub Kegiatan	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	13.439.700,00	9.939.050,00	73,95
Program	02.11.06	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	112.634.650,00	86.613.550,00	76,90
Kegiatan	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	112.634.650,00	86.613.550,00	76,90
Sub Kegiatan	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	31.935.000,00	27.572.200,00	86,34
Sub Kegiatan	2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	20.000.000,00	10.210.000,00	51,05
Sub Kegiatan	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.699.825,00	27.429.600,00	76,83
Sub Kegiatan	2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	24.999.825,00	21.401.750,00	85,61
Program	02.11.09	PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	36.079.900,00	28.074.150,00	77,81
Kegiatan	2.11.09.2.0127	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.079.900,00	28.074.150,00	77,81
Sub Kegiatan	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36.079.900	28.074.150,00	77,81
Program	02.11.10	PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	36.279.775,00	26.343.070,00	72,61
Kegiatan	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	36.279.775,00	26.343.070,00	72,61
Sub Kegiatan	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	16.279.775,00	9.748.600,00	59,88



Sub Kegiatan	2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	20.000.000,00	16.594.470,00	82,97
Program	02.11.11	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.848.202.474,00	5.809.533.269,00	99,34
Kegiatan	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.848.202.474,00	5.809.533.269,00	99,34
Sub Kegiatan	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.510.368.984,00	4.491.966.524,00	99,59
Sub Kegiatan	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1.337.833.490,00	1.317.566.745,00	98,49
02.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			15.964.729.617,00	15.122.095.918,00	94,72
Program	02.15.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.969.244.489,00	11.260.778.947,00	94,08
Kegiatan	02.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	28.937.375,00	96,46
Sub Kegiatan	02.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.900.800,00	98,02
Sub Kegiatan	02.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	2.404.960,00	96,20
Sub Kegiatan	02.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	2.494.305,00	99,77
Sub Kegiatan	02.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.370.180,00	94,81
Sub Kegiatan	02.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.493.430,00	99,74
Sub Kegiatan	02.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.273.700,00	95,16
Kegiatan	02.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.430.535.977,00	5.049.238.585,00	92,98
Sub Kegiatan	02.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.372.445.977,00	4.991.659.600,00	92,91
Sub Kegiatan	02.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.090.000,00	38.074.340,00	99,96
Sub Kegiatan	02.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	14.509.200,00	96,73
Sub Kegiatan	02.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.995.445,00	99,91



Kegiatan	02.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.839.700,00	16.490.080,00	79,13
Sub Kegiatan	02.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.839.700,00	16.490.080,00	79,13
Kegiatan	02.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.500.000,00	29.342.413,00	69,04
Sub Kegiatan	02.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42.500.000,00	29.342.413,00	69,04
Kegiatan	02.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.000.000,00	166.783.160,00	99,28
Sub Kegiatan	02.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.982.465,00	99,82
Sub Kegiatan	02.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.000.000,00	25.579.395,00	98,38
Sub Kegiatan	02.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.996.500,00	99,98
Sub Kegiatan	02.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	34.591.185,00	98,83
Sub Kegiatan	02.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	74.867.585,00	99,82
Sub Kegiatan	02.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000,00	6.766.030,00	96,66
Kegiatan	02.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.161.647.812,00	5.872.031.044,00	95,30
Sub Kegiatan	02.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.074.999.800,00	5.785.394.162,00	95,23
Sub Kegiatan	02.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.648.012,00	86.636.882,00	99,99
Kegiatan	02.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.721.000,00	97.956.290,00	84,65
Sub Kegiatan	02.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.990.800,00	22.720.845,00	98,83
Sub Kegiatan	02.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.900.200,00	55.553.560,00	76,20
Sub Kegiatan	02.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.852.000,00	97,04
Sub Kegiatan	02.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.900.000,00	6.899.950,00	100,00
Sub Kegiatan	02.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.930.000,00	7.929.935,00	100,00
Program	02.15.02	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.995.485.128,00	3.861.316.971,00	96,64
Kegiatan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.540.183.840,00	2.508.614.895,00	98,76



Sub Kegiatan	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	422.704.200,00	419.757.985,00	99,30
Sub Kegiatan	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.160.000.000,00	1.153.822.805,00	99,47
Sub Kegiatan	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	957.479.640,00	935.034.105,00	97,66
Kegiatan	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	7.111.100,00	6.544.015,00	92,03
Sub Kegiatan	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	7.111.100,00	6.544.015,00	92,03
Kegiatan	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	39.999.900,00	39.368.110,00	98,42
Sub Kegiatan	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	39.999.900,00	39.368.110,00	98,42
Kegiatan	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	336.977.996,00	328.343.301,00	97,44
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	77.038.956,00	71.002.236,00	92,16
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	17.800.000,00	17.357.160,00	97,51
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	9.794.475,00	97,94
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.510.000,00	7.155.120,00	95,27
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	199.999.040,00	199.787.000,00	99,89
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	19.217.310,00	96,09
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.630.000,00	4.030.000,00	87,04
Kegiatan	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	558.749.700,00	525.597.699,00	94,07
Sub Kegiatan	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	543.750.000,00	512.407.694,00	94,24
Sub Kegiatan	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	14.999.700,00	13.190.005,00	87,94
Kegiatan	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	19.999.600,00	16.075.955,00	80,38



Sub Kegiatan	2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	19.999.600,00	16.075.955,00	80,38
Kegiatan	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	492.462.992,00	436.772.996,00	88,69
Sub Kegiatan	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	310.213.192,00	292.079.489,00	94,15
Sub Kegiatan	2.15.02.2.09.02	Pengendalian, Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan Barang Antar Kota dlm 1 (satu) Kab/Kota	182.249.800,00	144.693.507,00	79,39
		JUMLAH	22.546.369.616,00	21.583.167.959,00	95,73

Pada dasarnya program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mendukung Visi Daerah “Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing dan Misi Daerah ke 1 dan 3 yakni “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik” dan “Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan” maka perlu dijabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah. Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung visi dan misi daerah adalah :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dengan indikator kinerja utama panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

2. Menurunnya pencemaran lingkungan indikator kinerja utama Indeks kualitas air dan udara

3. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi indikator kinerja utama nilai SAKIP
- Sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat dengan indikator kinerja utama Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

2. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja utama persentase meningkatnya layanan perkantoran

3. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dengan indikator kinerja utama persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

Permasalahan transportasi dan lingkungan Hidup secara umum di Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kelengkapan jalan yakni dari total kebutuhan kelengkapan jalan sebanyak 13.772 unit hanya sekitar 10.244 unit yang dapat tersedia pada tahun 2023. Selain itu sebagian kelengkapan jalan yang tersedia berada dalam kondisi yang tidak baik atau mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggaran yang belum memadai dalam pengadaan dan rehabilitasi kelengkapan jalan serta jumlah sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang.
2. Pada tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Mempawah, persentase kendaraan angkutan barang dan angkutan orang yang layak jalan adalah sebesar 26,28% yakni sebanyak 1412 unit yang melakukan uji kendaraan dari 5352 unit jumlah kendaraan wajib uji yang terdaftar. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan uji kendaraan dalam upaya keselamatan berlalu lintas. Pada unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Mempawah, masih terbatasnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yakni belum tersedianya 2 alat uji yakni speedometer tester dan slide slip tester. Beberapa alat uji juga dalam kondisi rusak yakni smoke tester dan Co/Hc. Dalam hal sumber daya manusia masih diperlukan beberapa pelatihan untuk meningkatkan uji kompetensi pengujian kendaraan bermotor.
3. Perencanaan Lingkungan Hidup masih belum menjadi prioritas dalam penentuan anggaran dan belanja daerah. Padahal proses perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan setiap urusan.
4. Perencanaan Lingkungan Hidup masih belum menjadi prioritas dalam penentuan anggaran dan belanja daerah. Padahal proses perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan setiap urusan.
5. Belum optimalnya proses pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Mempawah. Hal ini terindikasi dari terbatasnya dokumen uji kualitas lingkungan yang dilakukan karena minimnya sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia, belum adanya dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun secara berkala, tidak adanya petugas laboratorium yang

- menyebabkan keterbatasan fungsi laboratorium, hingga pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pemberian informasi yang masih terbatas.
6. Belum optimalnya proses pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Mempawah. Hal ini disebabkan masih banyak pelaku usaha dan atau kegiatan yang belum memahami proses pengendalian B3 dan LB3. Selain itu dari segi jumlah Sumber Daya Manusia yang melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 di Bidang Lingkungan Hidup juga masih sangat terbatas.
 7. Proses pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan mengalami kendala internal berupa minimnya jumlah fungsional pengendali lingkungan hidup yang ada di Bidang Lingkungan Hidup. Hal ini menyebabkan kecepatan verifikasi dokumen menjadi tidak seimbang dengan jumlah izin yang masuk. Selain itu, pelaku usaha/kegiatan juga terkadang tidak melengkapi dokumen persyaratan sehingga proses verifikasi berkas menjadi terlambat.
 8. Kurang optimalnya kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Padahal kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta menumbuhkan budaya peduli terhadap Lingkungan Hidup dari masyarakat /kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat.
 9. Menurunnya minat masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini perlu didorong oleh insentif maupun pendampingan secara intensif guna meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat.
 10. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pemantauan dalam pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup. Masalah tersebut disebabkan belum adanya JFT Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan PPNS serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengaduan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang

akan ditempuh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perlengkapan jalan
2. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

2.2 Analisis kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah selama 2 Tahun periode RKPD berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Realisasi RPJMD. Selanjutnya pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 84 Tahun 2021, tanggal 30 November 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah. Pada akhirnya pencapaian kinerja 2025 s/d 2026 mencakup penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD maupun capaian kinerja sesuai target IKK dan target indikator lainnya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kecelakaan yang disebabkan human error;
2. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian target SPM Bidang Perhubungan;
3. Rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah akan menempatkan Mempawah pada posisi strategis sehingga perlu meningkatkan konektivitas wilayah;
4. Kondisi prasarana perhubungan yang belum optimal, di sisi lain minat masyarakat menggunakan angkutan umum menurun;
5. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang.
6. Menurunnya kualitas air;
7. Bertambahnya volume timbunan sampah;
8. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan konservasi Lingkungan Hidup
9. Masih kurang optimalnya fungsi pembinaan instansi/sektor terkait terhadap usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya (peternakan, pertambangan dan perindustrian), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.

1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana table Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2025.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (*Prosesdur Bottom Up*).
3. Penjelasan temuan–temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program–program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi

masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas (mendesak) akan diusulkan pada tahun berikutnya.

1.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa kearah yang lebih baik lagi dan dapat merubah pola perencanaan dari shopping list ke working plan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran Renja 2025 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah tersebut adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)

Sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan dengan indikator kinerja utama Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Perlengkapan Jalan (Persentase)
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks).

Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mempawah, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah adalah sebagai OPD yang memiliki fungsi dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan Misi Kesatu dan Keempat Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2025 terdiri dari :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam serta untuk mengevaluasi konsekuensi dampak lingkungan dari produk dan proses-prosesnya, dan dampaknya pada kesehatan manusia dan lingkungan.
2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, bertujuan teroptimalisasinya upaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,

melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap lingkungan agar dapat dimonitor dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan hidup.

3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI), kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suatu ruang terbuka yang bersih, indah dan nyaman.
4. Program pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), bertujuan teroptimalisasinya pengendalian lingkungan dari bahan berbahaya dan beracun (B3).
5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), bertujuan memberikan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan terhadap izin lingkungan yang terbit dan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina
6. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, bertujuan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup.
7. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, bertujuan memberikan penghargaan terhadap dunia pendidikan / sekolah yang telah berkontribusi terhadap lingkungan hidup.
8. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup, bertujuan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
9. Program pengelolaan persampahan, bertujuan untuk menata dan mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan sumber daya manusia, prasana dan prasarana yang ada agar berjalan dengan baik.
10. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, bertujuan meningkatkan pelayanan reformasi dan birokrasi yang lebih baik guna mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran.
11. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), bertujuan untuk mengkoordinasikan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan agar berhasil dengan baik guna meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas.

Untuk lebih jelasnya rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal (Renja) Tahun 2025 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan perencanaan tahunan yang substansinya mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2026. Renja ini sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, serta RAPBD Tahun 2025.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	650.000.000,00	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	375.000.000,00	APBD
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.000.000.000,00	APBD
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	105.000.000,00	APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	95.000.000,00	APBD
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	559.250.000,00	APBD
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000,00	APBD
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	50.000.000,00	APBD
9	Program Pengelolaan Persampahan	7.009.219.921,00	APBD
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.130.248.816,00	APBD
11	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.730.000.000,00	APBD

BAB V

PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD. Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah telah merencanakan Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 11 program, 28 kegiatan dan 81 sub Kegiatan. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Mempawah.

Renja Tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah untuk Tahun Anggaran 2024. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2025-2026.

Mempawah, Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Mempawah



Drs. ASWIN AS, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196802031989031007

REALISASAI BELANJA DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. MEMPAWAH

DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	Realisasi	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			6,581,639,999.00	6,461,072,041.00	98.17
Program	2:11:02	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100,000,000.00	99,567,000.00	99.57
Kegiatan	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100,000,000.00	99,567,000.00	99.57
Sub Kegiatan	2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	100,000,000.00	99,567,000.00	99.57
Sub Kegiatan	2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	0.00	0.00	0.00
Program	2:11:03	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	108,578,800.00	83,983,717.00	77.35
Kegiatan	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	45,893,500.00	32,771,867.00	71.41
Sub Kegiatan	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	23,098,900.00	15,680,250.00	67.88
Sub Kegiatan	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	22,794,600.00	17,091,617.00	74.98
Kegiatan	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	62,685,300.00	51,211,850.00	81.70
Sub Kegiatan	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	62,685,300.00	51,211,850.00	81.70
Program	2:11:04	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	303,049,700.00	301,108,135.00	99.36
Kegiatan	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	303,049,700.00	301,108,135.00	99.36
Sub Kegiatan	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	303,049,700.00	301,108,135.00	99.36
Program	2:11:05	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	36,814,700.00	25,849,150.00	70.21
Kegiatan	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	23,375,000.00	15,910,100.00	68.06
Sub Kegiatan	2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	23,375,000.00	15,910,100.00	68.06
Sub Kegiatan	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	0.00	0.00	0.00
Kegiatan	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,439,700.00	9,939,050.00	73.95
Sub Kegiatan	2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0.00	0.00	0.00

Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	13,439,700.00	9,939,050.00	73.95
Program	2:11:06	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	112,634,650.00	86,613,550.00	76.90
Kegiatan	: 2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	112,634,650.00	86,613,550.00	76.90
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	31,935,000.00	27,572,200.00	86.34
Sub Kegiatan	2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	20,000,000.00	10,210,000.00	51.05
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35,699,825.00	27,429,600.00	76.83
Sub Kegiatan	2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	24,999,825.00	21,401,750.00	85.61
Program	2:11:09	PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	36,079,900.00	28,074,150.00	77.81
Kegiatan	: 2.11.09.2.0127	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36,079,900.00	28,074,150.00	77.81
Sub Kegiatan	: 2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36,079,900.00	28,074,150.00	77.81
Program	2:11:10	PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	36,279,775.00	26,343,070.00	72.61
Kegiatan	: 2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	36,279,775.00	26,343,070.00	72.61
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	16,279,775.00	9,748,600.00	59.88
Sub Kegiatan	2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	20,000,000.00	16,594,470.00	82.97
Program	2:11:11	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5,848,202,474.00	5,809,533,269.00	99.34
Kegiatan	: 2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5,848,202,474.00	5,809,533,269.00	99.34
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4,510,368,984.00	4,491,966,524.00	99.59
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1,337,833,490.00	1,317,566,745.00	98.49
02.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			15,964,729,617.00	15,122,095,918.00	94.72
Program	2:15:01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,969,244,489.00	11,260,778,947.00	94.08
Kegiatan	: 02.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000.00	28,937,375.00	96.46

Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000.00	4,900,800.00	98.02
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,500,000.00	2,404,960.00	96.20
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,500,000.00	2,494,305.00	99.77
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,500,000.00	2,370,180.00	94.81
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,500,000.00	2,493,430.00	99.74
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000.00	14,273,700.00	95.16
Kegiatan	: 02.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,430,535,977.00	5,049,238,585.00	92.98
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,372,445,977.00	4,991,659,600.00	92.91
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38,090,000.00	38,074,340.00	99.96
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000.00	14,509,200.00	96.73
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,000,000.00	4,995,445.00	99.91
Kegiatan	: 02.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20,839,700.00	16,490,080.00	79.13
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,839,700.00	16,490,080.00	79.13
Kegiatan	: 02.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42,500,000.00	29,342,413.00	69.04
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42,500,000.00	29,342,413.00	69.04
Kegiatan	: 02.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168,000,000.00	166,783,160.00	99.28
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	9,982,465.00	99.82
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,000,000.00	25,579,395.00	98.38
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000.00	14,996,500.00	99.98
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penqqandaan	35,000,000.00	34,591,185.00	98.83
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,000,000.00	74,867,585.00	99.82
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7,000,000.00	6,766,030.00	96.66
Kegiatan	: 02.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,161,647,812.00	5,872,031,044.00	95.30
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,074,999,800.00	5,785,394,162.00	95.23
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,648,012.00	86,636,882.00	99.99
Kegiatan	: 02.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115,721,000.00	97,956,290.00	84.65
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,990,800.00	22,720,845.00	98.83
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,900,200.00	55,553,560.00	76.20
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya	5,000,000.00	4,852,000.00	97.04

Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.08.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,900,000.00	6,899,950.00	100.00
Sub Kegiatan	: 02.15.01.2.08.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,930,000.00	7,929,935.00	100.00
Program	2:15:02	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3,995,485,128.00	3,861,316,971.00	96.64
Kegiatan	: 2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2,540,183,840.00	2,508,614,895.00	98.76
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	422,704,200.00	419,757,985.00	99.30
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,160,000,000.00	1,153,822,805.00	99.47
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	957,479,640.00	935,034,105.00	97.66
Kegiatan	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	7,111,100.00	6,544,015.00	92.03
Sub Kegiatan	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	7,111,100.00	6,544,015.00	92.03
Kegiatan	: 2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	39,999,900.00	39,368,110.00	98.42
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	39,999,900.00	39,368,110.00	98.42
Kegiatan	: 2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	336,977,996.00	328,343,301.00	97.44
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	77,038,956.00	71,002,236.00	92.16
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	17,800,000.00	17,357,160.00	97.51
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10,000,000.00	9,794,475.00	97.94
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7,510,000.00	7,155,120.00	95.27
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	199,999,040.00	199,787,000.00	99.89
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20,000,000.00	19,217,310.00	96.09
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,630,000.00	4,030,000.00	87.04
Kegiatan	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	558,749,700.00	525,597,699.00	94.07
Sub Kegiatan	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	543,750,000.00	512,407,694.00	94.24
Sub Kegiatan	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	14,999,700.00	13,190,005.00	87.94
Kegiatan	: 2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	19,999,600.00	16,075,955.00	80.38
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalin	19,999,600.00	16,075,955.00	80.38
Kegiatan	: 2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	492,462,992.00	436,772,996.00	88.69
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	310,213,192.00	292,079,489.00	94.15

Sub Kegiatan	:	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	182,249,800.00	144,693,507.00	79.39
JUMLAH				22,546,369,616.00	21,583,167,959.00	95.73

RANCANGAN AWAL RENJA OPD TAHUN 2025								
Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.15.2.11.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup		41.774.218.737,00	0,00	0,00	41.774.218.737,00	36.448.229.733,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		10.893.469.921,00	0,00	0,00	10.893.469.921,00	10.209.080.917,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Indikator:	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (1 Dokuman)	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Indikator:	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (1 Dokumen)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (1 Dokumen)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		375.000.000,00	0,00	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indikator:	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (1 Dokumen)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (1 Dokumen)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (1 Dokuman)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indikator:	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (1 Laporan)	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	964.687.500,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	964.687.500,00	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (4.82 Ha)	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	964.687.500,00	
	Pemeliharaan Jalur Hijau Kota Mempawah		75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
	Penataan Lampu Taman		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	pembangunan Rumah Nursery Kota Mempawah		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	pembangunan signage "Kabupaten Mempawah"		500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	Pembelian pupuk dan obat tanaman		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	Ornamen Hari Besar		75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
25049-035	Pasar Anjongan		500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Indikator: Sasaran:	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (1 Dokumen)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (1 Laporan)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (1 Dokumen)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (1 Dokumen)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	70.000.000,00	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator:	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	70.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (9 Dokumen)	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	50.000.000,00	
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (5 Orang)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		559.250.000,00	0,00	0,00	559.250.000,00	584.712.500,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator:	559.250.000,00	0,00	0,00	559.250.000,00	584.712.500,00	
		Sasaran:	Target:					
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (1 Dokumen)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (125 Orang)	509.250.000,00	0,00	0,00	509.250.000,00	534.712.500,00	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (1 Lembaga)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator:	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
		Sasaran:	Target:					
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (2 Entitas)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Indikator:	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (5 Pengaduan)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (1 Perkara)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		7.009.219.921,00	0,00	0,00	7.009.219.921,00	7.359.680.917,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Indikator:	7.009.219.921,00	0,00	0,00	7.009.219.921,00	7.359.680.917,00	
		Sasaran:	Target:					
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (1 Dokumen)	1.417.500.000,00	0,00	0,00	1.417.500.000,00	1.488.375.000,00	
	Tapak Kontainer Sampah		52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
	Tong Sampah (Kontainer Sampah)		599.006.000,00	0,00	0,00	599.006.000,00	0,00	
	Tong Sampah Plastik		153.705.000,00	0,00	0,00	153.705.000,00	0,00	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (10363 Ton)	5.591.719.921,00	0,00	0,00	5.591.719.921,00	5.871.305.917,00	
	Penimbunan Jalan Masuk TPA		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	Pembangunan gedung pemilah sampah		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	Perawatan Ringan Excavator (Baru)		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	Pemeliharaan Excavator (lama)		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	Rehabilitasi Kontainer Sampah		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
25025-006	Pengadaan mesin konveyor sampah		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	Pengadaan mesin pemilah dan pencacah sampah		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	Pengadaan Jembatan Timbang (TPA)		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	Rt, 005 / Rw. 005 dan Rt. 010 / Rw. 002		42.947.600,00	0,00	0,00	42.947.600,00	0,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		30.880.748.816,00	0,00	0,00	30.880.748.816,00	26.239.148.816,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		18.150.748.816,00	0,00	0,00	18.150.748.816,00	18.694.148.816,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator:	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	49.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	8.000.000,00	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.500.000,00	
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.500.000,00	
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2 Laporan)	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	18.000.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator:	6.368.748.816,00	0,00	0,00	6.368.748.816,00	6.367.648.816,00	
		Sasaran:	Target:					
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (75 Orang/bulan)	6.311.148.816,00	0,00	0,00	6.311.148.816,00	6.311.148.816,00	
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (24 Dokumen)	34.100.000,00	0,00	0,00	34.100.000,00	32.000.000,00	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 Laporan)	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.500.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (13 Laporan)	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.000.000,00	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	13.000.000,00	
		<i>Target:</i>						
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (6 Laporan)	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	13.000.000,00	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	127.000.000,00	
		<i>Target:</i>						
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (2 Paket)	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (15 Orang)	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	67.000.000,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	209.500.000,00	0,00	0,00	209.500.000,00	224.000.000,00	
		<i>Target:</i>						
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket)	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (2 Paket)	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	23.000.000,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (1 Paket)	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (1 Paket)	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	33.000.000,00	
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (1 Paket)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 Laporan)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	75.000.000,00	
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (2 Dokumen)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	3.330.000.000,00	0,00	0,00	3.330.000.000,00	3.355.000.000,00	
		<i>Target:</i>						
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (8 Unit)	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (2 Unit)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	170.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (10 Unit)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (10 Unit)	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator: Sasaran:	7.578.000.000,00	0,00	0,00	7.578.000.000,00	8.062.000.000,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (3 Laporan)	7.500.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	8.000.000.000,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 Laporan)	78.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00	62.000.000,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator: Sasaran:	481.000.000,00	0,00	0,00	481.000.000,00	496.500.000,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (1 Unit)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	35.000.000,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (45 Unit)	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 Unit)	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
	Rehabilitasi Halaman Kantor Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab.Mempawah		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	Rehabiltasi Ruang Tunggu/Lobby Gedung Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab.Mempawah		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	Kabupaten Mempawah		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (13 Unit)	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	14.500.000,00	
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (12 Unit)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		12.730.000.000,00	0,00	0,00	12.730.000.000,00	7.545.000.000,00	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (1 Dokumen)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (1 Dokumen)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (1 Dokumen)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	9.865.000.000,00	0,00	0,00	9.865.000.000,00	4.600.000.000,00	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (4 Unit)	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	600.000.000,00	
2524-008	HALAMAN PARKIR RT.004/RW.002, DESA PENITI LUAR, KEC. JONGKAT		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
2524-009	JALAN RAYA PENITI LUAR RT.004/002, DESA PENITI LUAR		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
2532-006	Halaman Pasar Sui. Purun kecil		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
2517-008	RT 02 / RW 01 Kel. Pedalaman Kec. Mempawah Timur		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
2509-011	Pasar Anjungan		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (160 Unit)	7.965.000.000,00	0,00	0,00	7.965.000.000,00	2.500.000.000,00	
	LPJU YON MARHANLAN XII (BATALYON MARINIR PERTAHANAN PANGKALAN XII) KUALA SECAPAH (LANJUTAN) KECAMATAN MEMPAWAH HILIR		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU YONIF MEKANIS 643 WANARA SAKTI ANJUNGAN (LANJUTAN) KEC. ANJONGAN		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU RT. 04/RW.04. DAN RT.05/RW.04 SUNGAI BATANG (LANJUTAN) KEC. SUNGAI PINYUH		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN BAKAU KECIL KEC. MEMPAWAH TIMUR		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN RAYA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT - SUNGAGI BATANG KEC. SUNGAI PINYUH		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN RAYA NUSAPATI - PENIRAMAN KEC.SUNGAI PINYUH		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN RAYA AIR HITAM (LANJUTAN) KEC. JUNGKAT		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN RAYA JUNGKAT- DEPAN LANTAMAL KEC. JUNGKAT		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN RAYA WAJOK KEC. JUNGKAT		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU BATAS KOTA BATU LAYANG KEC. JUNGKAT		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN A DJALANI GG.BOKRAN DAN GG.SINAR KEC. MEMPAWAH HILIR		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN RAYA BAKAU BESAR KEC. SUNGAI PINYUH		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN Dr. RUBINI (LANJUTAN) KEC. MEMPAWAH HILIR		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN PARIT KURUS BAKAU BESAR KEC.SUNGAI PINYUH		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
	LPJU JALAN RAYA SEPANG KEC. TOHO		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN RAYA PAK KADU KEC. TOHO		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN RAYA PAK KAWIN KEC.TOHO		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN RAYA PLADIS ANJUNGAN KEC. ANJUNGAN		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU KOM.SDN 07 MEMPAWAH HILIR KEC.MEMPAWAH HILIR		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN AL-FALAH GG.SEKAWAN KEC. MEMPAWAH HILIR		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU JALAN JOHANSYAH BAKRI KEC. MEMPAWAH TIMUR		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	LPJU Komplek Terminal Mempawah		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	LPJU Pasar Pagi Sungai Pinyuh		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	LPJU Jalan Pendidikan Sungai Pinyuh		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	LPJU Jalan M.Thaha Mempawah		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	LPJU PUKESMAS BAKAU KECIL		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
25061-012	Gang Rifa'i, Kelurahan Pasir Wan Salim		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
25049-022	Jln. Surya Bina Jaya		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
25040-004	JL. Moch Yasin Desa Mendalok		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
25014-008	Desa Pak Utan		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
25015-050	Desa Benuang		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
25015-051	Desa Benuang		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
25030-007	DUSUN RAHADI USMAN		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
25035-005	Gg. Masjid Dusun Tenang		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
25066-002	Desa Sungai Bakau Kecil		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
25031-005	Desa Sungai Duri I		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
25002-001	Pemasangan Tiang Listrik & PJU - Jalan Ilyas Bedul		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
25020-011	Sungai Bakau Besar Laut		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
25002-013	Pemasangan Tiang Listrik & PJU Menuju Makam		75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
25006-003	Jl. Raden Kusno		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
25053-011	HULU NGARAK		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
25005-017	Jl.Pematang Sukun		90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
25005-022	Gang Keluarga		80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
25008-006	desa malikian		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
25024-017	Jl Raya Desa Galang KM 52 - 52,8		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
25062-006	Jl. Djohansyah Bakri		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
2506-001	Jl. SMPN 4 DESA SUNGAI DURI I		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2506-002	JL. SEBRANG DESA SAMBORA		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2506-003	JL. MOH YASIN		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2506-004	JL. KARYA DESA SUNGAI DURI II		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2506-023	GG. SYARIF M. SALEH DESA SUNGAI DUNGUN		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2506-024	GG. M. YAMIN DESA SUNGAI DUNGUN		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2520-006	Parit Bujur , Rt. 03 - 04 - 05 / Rw. 04, Segedong		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2520-004	Pasar Segedong di Rt. 01-02/ Rw. 02		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2520-005	Jalan Pangguk Rt. 01-02 / Rw. 03, Segedong		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2520-007	Parit Lintang Bujur di Rt. 03-04 / Rw. 06, Dusun Suka Damai		125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
2520-008	Parit Penepat Kiri di Rt.03-05 / Rw. 012, Dusun Karya Utama		125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
2528-009	RT. 006/ RW. 003 Desa Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2516-008	Jalan Pakeng - Pamok di Rt. 010 / Rw. 004, Dusun Nangka		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2521-004	GG KEMBAR		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
2536-006	Jalan Lingkar Dari RT. 003, 004, 005, 006 Dusun Pak Ona Desa Pak Laheng Kec. Toho		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
2515-007	SUNGAI KUNYIT HULU		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (170 Unit)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	
	PEMELIHARAAN JARINGAN PJU KAB. MEMPAWAH		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	PENATAAN JARINGAN PJU MASYRAKAT (PENATA JARINGAN ILEGAL) KAB. MEMPAWAH		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	25032-006 Pemeliharaan PJU Wilayah Desa Sungai Duri II		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	25001-018 Lampu Jalan Dusun Parit Senin		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Indikator:	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	650.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (3 Unit)	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	650.000.000,00	
	REHAB TERMINAL JUNGKAT KEC. JUNGKAT		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	Rehabilitasi Terminal Sungai Pinyuh		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
Rehabilitasi Terminal Mempawah			200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Indikator:	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (12 Laporan)	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indikator:	865.000.000,00	0,00	0,00	865.000.000,00	875.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (1 Unit)	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (3 Orang)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (1000 Unit)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (1600 Dokumen)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (1 Laporan)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (1 Laporan)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (8 Unit)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (1 Laporan)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (1 Laporan)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Indikator:	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (2 Laporan)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.15.02.2.06.0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan (4 Unit)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (2 Dokumen)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (4 Laporan)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (1 Dokumen)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (4 Laporan)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Indikator:	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (2 Orang)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (1 Laporan)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (1 Dokumen)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator:	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	570.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (12 Laporan)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (4 Unit)	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	370.000.000,00	